



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR: 067/9566 / DISKONINFO - SP

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017, tentang Pedoman Informasi dan Dokumentasi Pengelolaan Pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, disebutkan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia;
 - c. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan diberikan kewenangan dalam melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 486/II/Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 909/V/Tahun 2023 tentang Penunjukan Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMAN : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 23 AGUSTUS 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku Atasan PID Provinsi Sulawesi Selatan



DIS. ANDI MUHAMMAD ARSIAD, M.Si
Panglima Pembina Utama Muda

NIP : 19721209 199203 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR: 067/9565/Diskominfo-SP
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

DAFTAR KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	- UUD 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	- Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN - Kemungkinan besar melanggar HAM - Kemungkin bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H	- Mengungkap data pribadi ASN	- Melindungi data pribadi ASN	Setelah mendapat izin tertulis dari

	dijatuhi hukuman disiplin	- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	- melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	yang bersangkutan.
3	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
4	Daftar Nilai SKP ASN	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
5	Data Rekam Medis ASN	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/11/2008	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

		tentang Rekam Medik, Pasal 1c	mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Menghindari keberatan atau gugatan hukum - Keamanan dan kenyamanan ASN yang bersangkutan	
6	Data usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.10 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural jo. - PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000	- Mengganggu dan menghambat - Proses penyusunan kebijakan - Karena adanya pengungkapan - secara prematur - Dapat merugikan pemerintah - Daerah dan ASN yang bersangkutan	- Menjaga kondusivitas proses penyusunan atau pengambilan keputusan - Menjaga keamanan pengambilan kebijakan - Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	- Menjaga kerahasiaan dokumen - Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
8	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Kepres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	- Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan atau program karena adanya pengungkapan secara prematur	- Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar - Mencegah terjadinya penilaian yang tidak	Selama Proses penawaran berjalan

			- Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif	obyektif	
9	Dokumen penawaran kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j. - Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian	Sampai proses pengadaan barang dan jasa selesai
10	Lokasi server	- UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 30-37 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30-37	- Mencegah tindakan pencurian - Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminil lainnya - Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu	- Mengamankan perangkat - Mengamankan data elektronik	Selama masih aktif
11	Internet Protokol/IP Address Privat	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3	Serangan Hacker	Mencegah serangan hacker dan Selama masih perlindungan hak privatisasi	Selama masih aktif
12	Bandwitch management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch	Selama masih aktif
13	Kode Akses Elektronik	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain	Selama masih aktif

				- Menjaga keamanan jaringan komputer	
14	Sistem keamanan elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
15	Sistem Management Database	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif digunakan
16	Hasil Pemeriksaan reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan	- UU No.1 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 huruf c dan Pasal 17 huruf i. - Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER/05/M. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Internal Pemerintah. - Peraturan Mendagri No. 28 tahun 2007, norma pengawasan pemerintah lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a	Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam Sampai ada mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai ada keputusan hukum
17	Naskah Soal	- Pasal 362 KUHP, Pasal 54 ayat	Membocorkan rahasia	Melindungi rahasia	Sampai digunakan /

	UN/UNBK/UASBN	(1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,	negara	negara	sesuai tahun Pelajaran
18	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	- Pasal 362 KUHP, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
19	Data KAK/OE/HPS/RAB	- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bisa menyebabkan proses lelang pekerjaan yang tidak sesuai dengan mekanisme atau tata cara pelelangan	Untuk menjaga kerahasiaan dalam proses pelelangan sehingga proses berjalan dengan lancar karena sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelelangan	Selama Proses Lelang hingga selesai
20	Source Code (basic Desain) Website dan aplikasi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Serangan hacker	- Menghindari serangan hacker - Perlindungan Hak Privat - Mencegah penyalahgunaan	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
21	Data Center Room	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan informasi	Pengamanan data	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
22	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	- Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara	Tersebarnya isi surat rahasia Negara	Pengamanan informasi	Selama belum tiba ke tujuan surat
23	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Membahayakan pelapor - Memungkinkan adanya	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya	Sampai ada keputusan hukum

		- PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- gugatan hukum dari yang bersangkutan - Memungkinkan penyalahgunaan informasi	- gugatan hukum - Mencegah penyalahgunaan informasi	
24	Bahan/data Pemeriksaan	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap	- Membahayakan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Memungkinkan penyalahgunaan informasi	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
25	Identitas Pelapor/Pengadu	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Mengancam keamanan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum - Mencegah penyalahgunaan informasi - Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor	Sampai ada keputusan hukum yang tetap atau ada izin tertulis dari yang bersangkutan
26	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Penyalahgunaan Data pribadi - Mendapat gugatan dari yang bersangkutan	Melindungi data pribadi seseorang	Sampai ada keputusan hukum yang tetap

27	Laporan Visum ET Repertum	- UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 - Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis - KUHAP pasal 184 ayat (1), pasal 187 huruf c	Bila dibuka tanpa seizin penyidik alat bukti ini akan cacat hukum dan tidak bisa digunakan untuk proses peradilan	Akan menjadi alat bukti yang hanya bisa diakses oleh penegak hukum yang menangani perkara	Selama proses hukum masih berlaku di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan
28	Resume Medis Pasien	- UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 - Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis pasal 10 dan pasal 12	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien - Semua orang/publik dapat mengetahui kondisi si sakit	Melindungi rahasia pribadi seseorang Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
29	Identitas pribadi pelapor dan klien korban kekerasan perempuan dan anak yang datang langsung atau melalui telepon	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun	Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor dan klien/korban	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan			
30	Dokumen Administrasi layanan Meliputi: 1. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan 2. form pengaduan dan hasil assesmen klien 3. Laporan hasil pemeriksaan psikologis 4. Laporan hasil klarifikasi 5. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak 6. Laporan hasil tindak lanjut layanan 7. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak pribadi klien	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
31	Identitas pribadi terlapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan	Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang

		(Pasal 17 huruf h)	dengan asas praduga tak bersalah)		Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
32	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang
33	Alamat rumah aman	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien	Perlindungan terhadap klien	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang

		Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan			
34	Dokumen reintegrasi korban: 1. Berita Acara Penyerahan Klien 2. Surat Tanda Terima Barang klien 3. Surat Pernyataan Orang Tua klien	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan			
35	Dokumen administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi : a. Akta Cerai b. Laporan sosial c. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan d. Laporan Polisi e. Dll.	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
36	Surat Terminasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang	Sampai Ada

		Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan	Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	bersifat rahasia	Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
37	Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Audit,Investigasi, Reviu, Evaluasi, Monev)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a) - PP Nomor 12 Tahun Pasal 26	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	- Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor - Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab - Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)

			- Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya - Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		
38	Laporan Hasil Koordinasi APIP dan APH	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a) - PP Nomor 12 Tahun 2017 (Pasal 23 angka (2), Pasal 26)	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana - Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya - Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	- Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor - Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab - Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)
39	Dokumen perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (<i>Incracht</i>)

		- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permendagri No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah		hukum suatu dokumen	hakim (<i>Incracht</i>)
--	--	---	--	---------------------	---------------------------

Pj. SEKRETARIS DAERAH
Sekretaris PRID Provinsi Sulawesi Selatan



Drs. ANDI MUHAMMAD ARSIAD, M.Si
Panglima Pembina Utama Muda
NIP : 19721209 199203 1 004

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 067/9565/Diskominfo-SP

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Baruga Lounge (Toraja Room) Gedung A, Lantai I Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Akan Dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	- UUD 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	- Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN - Kemungkinan besar melanggar HAM - Kemungkin bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

			- Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	
3	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
4	Daftar Nilai SKP ASN	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
5	Data Rekam Medis ASN	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/11/2008 tentang Rekam Medik, Pasal 1c	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum - Keamanan dan	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

				kenyamanan ASN yang bersangkutan	
6	Data usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.10 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural jo. - PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000	- Mengganggu dan menghambat - Proses penyusunan kebijakan - Karena adanya pengungkapan - secara prematur - Dapat merugikan pemerintah - Daerah dan ASN yang bersangkutan	- Menjaga kondusivitas proses penyusunan atau pengambilan keputusan - Menjaga keamanan pengambilan kebijakan - Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	- Menjaga kerahasiaan dokumen - Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
8	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 hurufi dan huruf j - Kepres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	- Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan atau program karena adanya pengungkapan secara prematur - Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif	- Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar - Mencegah terjadinya penilaian yang tidak obyektif	Selama Proses penawaran berjalan
9	Dokumen penawaran	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang	- Menghindari persaingan	Menjaga obyektivitas	Sampai proses

	kontrak	KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j. - Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	usaha yang tidak sehat	penilaian	pengadaan barang dan jasa selesai
10	Lokasi server	- UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 30-37 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30-37	- Mencegah tindakan pencurian - Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminil lainnya - Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu	- Mengamankan perangkat - Mengamankan data elektronik	Selama masih aktif
11	Internet Protokol/IP Address Privat	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3	Serangan Hacker	Mencegah serangan hacker dan Selama masih perlindungan hak privatisasi	Selama masih aktif
12	Bandwitch management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch	Selama masih aktif
13	Kode Akses Elektronik	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
14	Sistem keamanan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Penyalahgunaan oleh pihak	- Mencegah	Selama masih aktif

	elektronik	- KIP, Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	lain	- penyalahgunaan oleh pihak lain - Menjaga keamanan jaringan komputer	
15	Sistem Management Database	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif digunakan
16	Hasil Pemeriksaan reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan	- UU No.1 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 huruf c dan Pasal 17 huruf i. - Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER/05/M. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Internal Pemerintah. - Peraturan Mendagri No. 28 tahun 2007, norma pengawasan pemerintah lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a	Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam Sampai ada mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai ada keputusan hukum
17	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	- Pasal 362 KUHP, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
18	Proses Scanning/Scoring	- Pasal 362 KUHP, Pasal 54 ayat	Membocorkan rahasia	Melindungi rahasia	Sampai digunakan /

	UN/UNBK/UASON	(1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,	negara	negara	sesuai tahun Pelajaran
19	Data KAK/OE/HPS/RAB	- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bisa menyebabkan proses lelang pekerjaan yang tidak sesuai dengan mekanisme atau tata cara pelelangan	Untuk menjaga kerahasiaan dalam proses pelelangan sehingga proses berjalan dengan lancar karena sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelelangan	Selama Proses Lelang hingga selesai
20	Source Code (basic Desain) Website dan aplikasi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Serangan hacker	- Menghindari serangan hacker - Perlindungan Hak Privat - Mencegah penyalahgunaan	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
21	Data Center Room	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan informasi	Pengamanan data	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
22	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	- Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara	Tersebar nya isi surat rahasia Negara	Pengamanan informasi	Selama belum tiba ke tujuan surat
23	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	- Membahayakan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Memungkinkan	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum - Mencegah penyalahgunaan	Sampai ada keputusan hukum

		Pemerintahan Daerah	penyalahgunaan informasi	informasi	
24	Bahan/data Pemeriksaan	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap	- Membahayakan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Memungkinkan penyalahgunaan informasi	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
25	Identitas Pelapor/Pengadu	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Mengancam keamanan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum - Mencegah penyalahgunaan informasi - Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor	Sampai ada keputusan hukum yang tetap atau ada izin tertulis dari yang bersangkutan
26	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Penyalahgunaan Data pribadi - Mendapat gugatan dari yang bersangkutan	Melindungi data pribadi seseorang	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
27	Laporan Visum ET Repertum	- UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2	Bila dibuka tanpa seizin penyidik alat bukti ini akan cacat hukum dan tidak bisa	Akan menjadi alat bukti yang hanya bisa diakses oleh penegak hukum	Selama proses hukum masih berlaku di tingkat

		- Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis - KUHAP pasal 184 ayat (1), pasal 187 huruf c	digunakan untuk proses peradilan	yang menangani perkara	kepolisian, kejaksaan dan pengadilan
28	Resume Medis Pasien	- UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 - Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis pasal 10 dan pasal 12	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien - Semua orang/publik dapat mengetahui kondisi si sakit	Melindungi rahasia pribadi seseorang Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
29	Identitas pribadi pelapor dan klien korban kekerasan perempuan dan anak yang datang langsung atau melalui telepon	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata	Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor dan klien/korban	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan			
30	Dokumen Administrasi layanan Meliputi: 1. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan 2. form pengaduan dan hasil assesmen klien 3. Laporan hasil pemeriksaan psikologis 4. Laporan hasil klarifikasi 5. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak 6. Laporan hasil tindak lanjut layanan 7. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak pribadi klien	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
31	Identitas pribadi terlapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang

					bersangkutan
32	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang
33	Alamat rumah aman	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien	Perlindungan terhadap klien	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang

		Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan			
34	Dokumen reintegrasi korban: 1. Berita Acara Penyerahan Klien 2. Surat Tanda Terima Barang klien 3. Surat Pernyataan Orang Tua klien	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		- 2022 tentang Standar Layanan Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan			
35	Dokumen administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi : a. Akta Cerai b. Laporan sosial c. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan d. Laporan Polisi e. Dll.	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
36	Surat Terminasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau

		- Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan	dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis		persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
37	Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Audit,Investigasi, Reviu, Evaluasi, Monev)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a) - PP Nomor 12 Tahun Pasal 26	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana - Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan	- Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor - Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab - Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)

			keluarganya - Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		
38	Laporan Hasil Koordinasi APIP dan APH	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a) - PP Nomor 12 Tahun 2017 (Pasal 23 angka (2), Pasal 26)	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana - Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya - Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	- Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor - Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab - Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)
39	Dokumen perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permendagri No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu dokumen	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (<i>Incracht</i>)

		Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah			
--	--	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas di lakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	A. M. ARSTAD	Pj. Sekda Prov	Pemprov Sulsel	
2	Nurul Khaezah	Admin PPD Utama	Disdikmipa Sulsel	
3	Ferry Yanna A.	Kabid Humas	Disdikmipa Sulsel	
4	Andi Taufik	Sekda	Dakamipa	
5	Sumarlin	Kabag delensntr 2 kprasm	Biro Pembetulan	
6	Andi Surahmi	Staff Program	Bappelitbangda.	
7	ZUL AEFMAL	Kasubag. TU	B. organisasi	
8	KAMOLIA HAMZAH	APIT/PPUPD deapda	WAKIL TOKAT	
9	ASRIYADY	Kasubag. Umum	BKD	
10	ANDI ANWARALIP	Staff PA	BKD	
11	MUHAMMAD RAMA BATARA EKASAKTI	Staff	BIRO PEMERINTAHAN & OTRA	
12	Arifloni	Staff	Bappelitbangda	
13	Nurkhal Fatailah	Staff	RSUD Labuang Baji	
14	MUHAMMAD IQSAN NURTANS	Analys Pengabayan SDM	Inspektat	
15	UMAR HAMDAN	ANALIS ke DPA-DALDUK	DP3A DALDUK KB	
16	SYARIFA YUFI ULPIA	Staff	Biro Hukum	
17	BOWO MIRANDA	STAF	URT PPA DP3A PROV SULSEL.	
18	Cici Adesja	STAF	URT PPA PP3A PROV SULSEL	

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Delapan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Baruga Lounge (Toraja Room) Gedung A, Lantai I Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	- UUD 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	- Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN - Kemungkinan besar melanggar HAM - Kemungkin bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

			pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	
3	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
4	Daftar Nilai SKP ASN	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
5	Data Rekam Medis ASN	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/11/2008 tentang Rekam Medik, Pasal 1c	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

				- Keamanan dan kenyamanan ASN yang bersangkutan	
6	Data usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.10 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural jo. - PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000	- Mengganggu dan menghambat - Proses penyusunan kebijakan - Karena adanya pengungkapan - secara prematur - Dapat merugikan pemerintah - Daerah dan ASN yang bersangkutan	- Menjaga kondusivitas proses penyusunan atau pengambilan keputusan - Menjaga keamanan pengambilan kebijakan - Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	- Menjaga kerahasiaan dokumen - Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
8	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Kepres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	- Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan atau program karena adanya pengungkapan secara prematur - Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif	- Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar - Mencegah terjadinya penilaian yang tidak obyektif	Selama Proses penawaran berjalan

9	Dokumen penawaran kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j. - Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian	Sampai proses pengadaan barang dan jasa selesai
10	Lokasi server	- UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 30-37 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30-37	- Mencegah tindakan pencurian - Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminil lainnya - Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu	- Mengamankan perangkat - Mengamankan data elektronik	Selama masih aktif
11	Internet Protokol/IP Address Privat	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3	Serangan Hacker	Mencegah serangan hacker dan Selama masih perlindungan hak privatisasi	Selama masih aktif
12	Bandwitch management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch	Selama masih aktif
13	Kode Akses Elektronik	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif

14	Sistem keamanan elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
15	Sistem Management Database	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif digunakan
16	Hasil Pemeriksaan reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan	- UU No.1 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 huruf c dan Pasal 17 huruf i. - Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER/05/M. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Internal Pemerintah. - Peraturan Mendagri No. 28 tahun 2007, norma pengawasan pemerintah lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a	Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam Sampai ada mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai ada keputusan hukum
17	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	- Pasal 362 KUHP, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran

18	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	- Pasal 362 KUHP, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
19	Data KAK/OE/HPS/RAB	- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bisa menyebabkan proses lelang pekerjaan yang tidak sesuai dengan mekanisme atau tata cara pelelangan	Untuk menjaga kerahasiaan dalam proses pelelangan sehingga proses berjalan dengan lancar karena sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelelangan	Selama Proses Lelang hingga selesai
20	Source Code (basic Desain) Website dan aplikasi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Serangan hacker	- Menghindari serangan hacker - Perlindungan Hak Privat - Mencegah penyalahgunaan	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
21	Data Center Room	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan informasi	Pengamanan data	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
22	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	- Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara	Tersebar nya isi surat rahasia Negara	Pengamanan informasi	Selama belum tiba ke tujuan surat
23	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan	- Membahayakan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum - Mencegah	Sampai ada keputusan hukum

		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Memungkinkan penyalahgunaan informasi	penyalahgunaan informasi	
24	Bahan/data Pemeriksaan	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap	- Membahayakan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Memungkinkan penyalahgunaan informasi	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
25	Identitas Pelapor/Pengadu	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Mengancam keamanan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum - Mencegah penyalahgunaan informasi - Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor	Sampai ada keputusan hukum yang tetap atau ada izin tertulis dari yang bersangkutan
26	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Penyalahgunaan Data pribadi - Mendapat gugatan dari yang bersangkutan	Melindungi data pribadi seseorang	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
27	Laporan Visum ET Repertum	- UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47	Bila dibuka tanpa seizin penyidik alat bukti ini akan	Akan menjadi alat bukti yang hanya bisa diakses	Selama proses hukum masih

		ayat 2 - Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis - KUHAP pasal 184 ayat (1), pasal 187 huruf c	cacat hukum dan tidak bisa digunakan untuk proses peradilan	oleh penegak hukum yang menangani perkara	berlaku di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan
28	Resume Medis Pasien	- UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 - Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis pasal 10 dan pasal 12	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien - Semua orang/publik dapat mengetahui kondisi si sakit	Melindungi rahasia pribadi seseorang Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
29	Identitas pribadi pelapor dan klien korban kekerasan perempuan dan anak yang datang langsung atau melalui telepon	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020	Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor dan klien/korban	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan			
30	Dokumen Administrasi layanan Meliputi: 1. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan 2. form pengaduan dan hasil assesmen klien 3. Laporan hasil pemeriksaan psikologis 4. Laporan hasil klarifikasi 5. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak 6. Laporan hasil tindak lanjut layanan 7. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak pribadi klien	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
31	Identitas pribadi terlapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis

					dari yang bersangkutan
32	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang
33	Alamat rumah aman	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien	Perlindungan terhadap klien	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang

		Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan			
34	Dokumen reintegrasi korban: 1. Berita Acara Penyerahan Klien 2. Surat Tanda Terima Barang klien 3. Surat Pernyataan Orang Tua klien	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

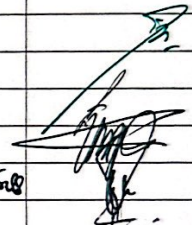
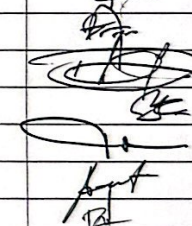
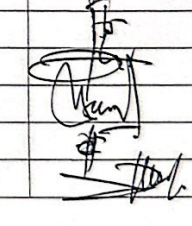
		- Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan			
35	Dokumen administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi : a. Akta Cerai b. Laporan sosial c. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan d. Laporan Polisi e. Dll.	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
36	Surat Terminasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu Mengungkap rahasia	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang

		Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan - Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan	Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis		Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
37	Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Audit,Investigasi, Reviu, Evaluasi, Monev)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a) - PP Nomor 12 Tahun Pasal 26	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana - Membahayakan keselamatan dan keamanan	- Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor - Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab - Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)

			penegak hukum dan keluarganya - Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		
38	Laporan Hasil Koordinasi APIP dan APH	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a) - PP Nomor 12 Tahun 2017 (Pasal 23 angka (2), Pasal 26)	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana - Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya - Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	- Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor - Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab - Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)
39	Dokumen perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permendagri No. 12 Tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu dokumen	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (<i>Incracht</i>)

		2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah			
--	--	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada Berita Acara di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	A-M. ARSIJAD	PJ. Seksi Pw	Purwar Sulsel	
2.	Nuri Khairah	PPD Utama	Disdikpora Sulsel	
3.	Yessy Yocana A	Kabid Humas	Disdikpora Sulsel	
4.	Andi Tampile	Sekdis	Dikominfo	
5.	Suwardin	Katag Delemas & kagis	Pors Penelitian Selis pr. sis	
6.	Andi Sutahuni	staf. program	Bappelitbangda	
7.	Zul Arfan AL	Kasubag. TU	B. organisasi	
8.	Umar Ismail	Analisis dan aspektual	Aspektual KB	
9.	KAMOLIA HANZAH	APIP / MPPA NADYA	INSPEKTORAT	
10.	ASRIYATI.	Kasubag. Umum	BKD	
11.	ANDI ALUWATI	STAFF	ISTO	
12.	MUHAMMAD RAMA BATARA EKASAEI	Staff	BIRO PEMERINTAHAN & OTDA	
13.	Naskah filailah.	-	RSUD Labuang Bgs	
14.	Arfoni	Staff	Bappelitbangda	
15.	MUHAMMAD IQBAN NURTANI	Analisis Pagumbayan SDM	Inspektat	
16.	Panis Indrayana	Pengaduan & Kerasuhan	Inspektat	
17.	SYARIFA YUPI ULFA	Staff	Biro Hukum	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 – Telepon (0411) 449968 Fax: 449968
MAKASSAR 90231

BERITA ACARA

Nomor : 067/9727/DISKONINFO-SP

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Command Center Gedung A Lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar, telah dilaksanakan rapat penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan :

1. Daftar Informasi Publik yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Ini.
2. Penetapan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud selanjutnya dituangkan kedalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Atasan PPID.

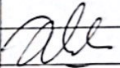
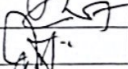
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Agustus 2023

Yang bertanda tangan :
(daftar terlampir)

Yang bertandatangan Berita Acara Penetapan Daftar Informasi Publik :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	A. M. ARSIAD	Dj. Sekda Prov	Pemprov Sulsel	
2	Dedy Sugeng	Prof. Thoro -	Diskominfo Sulsel	
3	Deba Agudhistra	Anal. Publikasi	Diskominfo Sulsel	
4	Samirini	Kabid Humas	Diskominfo Sulsel	
5	Nani Khairah	Admin PPID Utama	Diskominfo Sulsel	
6	Nurkhamah	Admin. PPID	Disnakertrans	
7	CHERRY DORIS	Admin PPID	UPT TRANSPARANSI DAERAH	
8	LESA RIANTI	Humas	Anal. Informasi	
9	Amaliah Kertini	Staff	Diskominfo	
10	Fitriah Muthia	Staff	Diskominfo	
11	Jumriani	Staff	Humas	
12	Rezita Adityana A	Prinafa Humas	Diskominfo Sulsel	
13	Nur Rahma	Admin PPID	Dinas perpus & Arsip	
14	Abdul Puhanur	PPID capil	Disdutaqam	
15	UMAR HAMDANI	Admin PPID	DP3A BALOK K8	
16	Sulton Ralub	Kabid Aptika	Diskominfo Sulsel	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
17	A Diah	Kabid Statistik	Disdikmuf - sulsel	
18	GRACE ZEFANYA TOREH	STAFF PPID	DISPERINDAS	ak.
19	JAWAHAR	PPID	SIKAS BINA MANUSIA	
20	Andi Sisnawati	PPID	DisPerindag.	
21	Dewi Yuliani	Humas	Disdikmuf	
22	IRFAN	Rel PP	STAF	
23	Suyono	Sampel PP	Ag PPID	af.
24	A. Paulang	gandiman ahli pertan	Persandian	
25	AJHAUL KAPPI	Programat	Satpol PP	
26	Andi Sutahum	STAF	Bupelitbang	
27	HENDORO	STAF	Kemko-SP	
28	Muti Yusup	STAF	PERSANDIAN	
29	FITRAH	STAF Persandian.	persandian	
30	B. SYARIF H.	— — —	— — —	
31	Nabi Rahman	— " —	— " —	
32	Syarifa Yufi ulfia	staf	Biro Hukum	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
33	Azzizah Rahmasari	Staf	Biro Hukum	
34	MASMIH J	SEK DEP SULSEL	DEP SULSEL	
35	M. SYUKUR.	Staf	DEP SULSEL	
36	Muhammad Yasmun	Staf	Biro PBJ	
37	G. Arwin Gani	Staf program	BKAD	
38	INDRA .R	Staf	BKAD	
39	AYUB GASALI, S.P	STAF	DINAS TPABON	
40	SALIM WAHARSIMANDY	STAF	DINR PEMERINTAHAN	
41	Zahmanis	Staf	Diskominfo	
42	YUSRISAL	Staf	B. Umum	
43	ASRIYANAS	Ka umum	BKD	
44	ANDI ANICKATIP	Andis Hukum	BKD	
45	Nurtiahy	Am. peris	B. Eku	
46	Rusdiana	PPID	Refonarnode	
47	MUSTAPA	PRD	RS Parkiri	
48	El. Muskaedus	Pragr	RS. Dadi	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
49	M. Fedy Afrianto T	Staf	Diskominfo	
50	Andi Aisyah Pertiwi	staf	Diskominfo	
51	Mangem Dewi Astuti	Staf	Diskominfo - sp.	
52	Hartini Dewi	Praktikum	Humas Diskominfo-SP	
53	Dejari Susanty Syam.	Sekretaris	Dispersinfa.	
54	MAIDINI PUTRA PRATAMA		Sat pol PP	
55	Haranto Irawan	Kasabag Adminkes	Itprov	
56	Raniy cyclamaryan	Pengadunshari Kerog	Itprov	
57	Muhammad Rosyid R	ppm PTSP	ppm PTSP	
58	Dasy Menni	Distek Pro dan Staf	Distek pro sulsel	
59	Amirah	Administrasi	Diskominfo	
60	H. Hastawati	- - -	- - -	
61	M. Arif Perdana	Staf	B. Unsur	
62	Sulphar diana	Kasabag Umum	DIS TPTBUN	
63	A. Alhar & Sulhan Sangrawana	Staf	BEAD	
64	MURHAN	Reception	KPO PB	